

BAB II

ELEMEN DALAM BENCANA SEBAGAI DASAR PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai elemen dalam bencana sebagai dasar dalam pengurangan risiko bencana. Tentunya perlu untuk mengetahui terkait gambaran umum dan potensi bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah, beberapa elemen yang berhubungan antara; risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas dalam bencana, serta aktor-aktor yang berkecimpung dalam pelaksanaan kerjasama internasional yang akan dijelaskan secara rinci dari sub bab berikut.

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah terletak diantara dua Provinsi besar, yaitu Jawa barat dan Jawa Timur. Secara astronomis, terletak pada 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur dengan jarak 263 km dari barat ke timur (termasuk Pulau Karimunjawa) dan 226 km dari utara ke selatan (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D. I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sebesar $\pm 32.800 \text{ km}^2$, atau sekitar 25.04% dari luas Pulau Jawa dan 1,70% dari luas Negara Indonesia (BAPPEDA Jawa Tengah, 2018: 24). Batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah



Sumber: PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Luas tersebut dihuni oleh sekitar 36,4 juta jiwa penduduk yang menempati 29 Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan, 8.559 desa/kelurahan wilayah administratif Jawa Tengah (BPS Jateng, 2020). Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah menempatkan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur.

2.1.2 Kondisi Topografi

Bagian dari provinsi Jawa Tengah berkisar dari dataran berupa pantai hingga pegunungan. Wilayah pesisir memiliki dataran sempit yang terletak di selatan Jawa Tengah dengan lebar 1025 km. Daerah pesisir dengan dataran sempit juga terdapat di bagian utara Jawa Tengah. Selain itu, terdapat dataran di daerah Brebes yang

lebarnya mencapai 40 km dari pantai dan di Semarang lebarnya hanya 4 km. Dataran tinggi ini terhubung dengan dataran Semarang Rembang di sebelah timur. Salah satu aspek yang mempengaruhi peluang terjadinya banjir adalah kondisi wilayah yang berupa dataran. Berdasarkan penjelasan di atas, kondisi Topografi Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2018-2023

Selain dataran, tanah di Provinsi Jawa Tengah memiliki kemiringan lahan sebesar 0-2% yang mewakili 38% dari total luas, 31% lahan memiliki kemiringan sebesar 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya beberapa medan yang memiliki kemiringan lereng yang lebar dan dominan landai dengan rasio kemiringan yang rendah. Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang

umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 mdpl.

Terdapat 5 gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah antara lain adalah Gunung Merapi (di Magelang - Boyolali - Klaten), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung - Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung - Wonosobo - Magelang), dan Gunung Dieng (di Banjarnegara). Jawa Tengah memiliki iklim tropis, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.000 meter, dan suhu rata-rata 21-32°C. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusakambangan bagian barat, dan sepanjang Pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah hujan rendah dan sering terjadi kekeringan di musim kemarau berada di daerah Blora dan sekitarnya serta di bagian selatan Kabupaten Wonogiri (BAPPEDA Jawa Tengah, 2018: 25).

2.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020 sebanyak 36,52 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami penambahan sekitar 4,1 juta jiwa atau rata-rata 400 ribu setiap tahun. Jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,36 juta jiwa, atau 50,29 persen dari penduduk Jawa Tengah. Sementara jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,15 juta jiwa, atau 49,71 persen dari penduduk Jawa Tengah. Dari

kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah sebesar 101,15 (BPS Jateng, 2020).

Berdasarkan kependudukan yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36,52 juta jiwa, tentunya diantara jumlah tersebut terdapat masyarakat atau kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang kehidupan sehari-hari atau kehidupan masyarakatnya sangat terbatas dalam jangka panjang karena cacat fisik, keterbelakangan mental, atau cacat mental (UN Comm on RPD, 2007). Disabilitas bisa terjadi karena beberapa faktor seperti bawaan dari lahir, masalah kesehatan, korban bencana alam, serta bencana sosial.

Jenis-jenis penyandang disabilitas dibagi menjadi disabilitas mental (kelainan mental), disabilitas fisik (kelainan fisik), disabilitas ganda (tuna ganda). Berbicara mengenai disabilitas mental, terdiri dari mental tinggi dan mental rendah. Dimana mental tinggi dikenal sebagai orang berbakat dan intelektual, yang memiliki kemampuan dan kreativitas di atas rata-rata. Sedangkan mental rendah, kapasitas intelektual berada di bawah rata-rata. Mental rendah kemudian dibagi lagi menjadi dua kelompok, yakni anak lamban belajar (*slow learners*) yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) berkisar antara 70-90, sedangkan anak berkebutuhan khusus memiliki IQ di bawah 70 (Reefani, 2013:177).

Kemudian disabilitas fisik memiliki beberapa macam kategori, seperti kelainan tubuh (Tuna Daksa) yang memiliki gangguan gerak pada tubuh disebabkan penyakit bawaan atau karena kecelakaan, polio dan lumpuh. Kemudian Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra) yang memiliki gangguan pada bagian penglihatan,

sehingga tidak memiliki jangkauan luas penglihatan seperti individu pada umumnya. Tuna Netra ini dibagi menjadi dua golongan yakni buta total dan penglihatan rendah. Selanjutnya yakni kelainan pendengaran (Tuna Rungu) dimana individu memiliki hambatan atau gangguan pendengaran.

Terakhir yakni Kelainan Bicara (Tuna Wicara) yakni individu yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam hal berkomunikasi atau berbicara, ini dapat disebabkan juga karena Tuna Rungu maupun hal lainnya seperti penyakit bawaan atau kecelakaan (Reefani, 2013:177). Kemudian jenis penyandang disabilitas yang terakhir ialah disabilitas ganda (Tuna Ganda) dimana individu tersebut menderita disabilitas lebih dari satu kecacatan seperti cacat fisik dan mental. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data penyandang disabilitas dari rentang tahun 2016-2018 untuk melihat perbandingan jumlah penyandang disabilitas. Penyajian data tersebut dapat terlihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Jumlah Total Penyandang Disabilitas di Jawa Tengah Tahun 2016-2018

Tahun		
2016	2017	2018
129.718	146.050	268.909

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada tabel penyajian di atas, tahun 2016 terdapat sebanyak 129.718 jiwa penyandang disabilitas yang terdiri dari anak-anak sebanyak 23.162 jiwa dan sisanya dari remaja sampai lansia sebanyak 106.556 jiwa. Kemudian pada tahun 2017 terdapat penambahan menjadi jiwa penyandang disabilitas yang terdiri dari anak-anak sebanyak 23.044 jiwa dan sisanya sebanyak 123.006 jiwa. Adanya

penambahan pada tahun 2018 yang terdiri dari anak-anak sebanyak 28.364 jiwa dan sisanya sebanyak 240.545. Penyandang disabilitas tersebut terdiri dari disabilitas mental, disabilitas fisik, serta disabilitas tuna ganda. Adanya penambahan disabilitas tersebut tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

2.1.4 Bencana di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah, serta kondisi dan karakteristik wilayah Jawa Tengah yang memiliki beberapa aspek yang cukup kompleks mulai dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis. Namun, disisi lain wilayah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi luas bahaya pada setiap bencana, baik bencana alam maupun non alam, serta bencana sosial. Kepadatan penduduk yang tinggi juga berdampak pada bencana alam. Efek ini dikarenakan pertambahan penduduk mempengaruhi kepadatan jumlah rumah atau bangunan sehingga menyebabkan kekurangan lahan. Rumah atau bangunan yang berdekatan mempengaruhi tidak terserapnya air tanah. Selain itu, taman yang menjadi paru-paru kota sekaligus daerah aliran sungai semakin menyusut. Untuk mengkaji potensi ancaman bencana, BPBD Jawa Tengah telah berupaya menginventarisasi serta memperhitungkan sejarah kejadian bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui Hasil analisis Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2015, penulis menyajikan tabel terkait potensi bencana di Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat melalui tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Potensi Bencana Provinsi Jawa Tengah

Potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah	
1. Banjir	2. Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Cuaca Ekstrem	4. Kegagalan Teknologi
5. Epidemik dan Wabah Penyakit	6. Kekeringan
7. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	8. Letusan Gunung Merapi
9. Gempa Bumi	10. Tanah Longsor
11. Tsunami	12. Banjir Bandang

Sumber: BPBD Jawa Tengah, 2018

Melihat tabel potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 12 potensi bencana yang mengancam daerah rawan bencana di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 34.490.835 jiwa (9.719.925 KK), dan bila data tersebut disesuaikan dengan penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, penjelasan di atas dapat dilihat dari tabel 2.3 mengenai daerah rawan bencana pada wilayah Provinsi Jawa Tengah berikut.

Tabel 2. 3 Daerah Rawan Bencana Pada Wilayah Provinsi Jawa Tengah

No	Bencana	Kab/Kota		Kec		Desa/Kel		KK	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Banjir	32	85,71	295	51,5	1.674	19,5	743.264	7,70
2	Longsor	29	82,25	320	55,8	2.136	24,9	642.001	6,4
3	Kekeringan	27	74,28	219	38,2	1.314	15,3	677.952	6,8
4	Angin Puting beliung	15	42,85	132	23	752	8,8	282.212	2,9
Kolom 1									

No	Bencana	Kab/Kota	Kec	Desa/Kel	KK	No	Bencana	Kab/Kota	Kec
5	Gempa Bumi	21	37,14	114	19,9	1.499	17,5	1.416.145	15,1
6	Tsunami	4	11,42	20	3,5	127	1,5	128.186	1,3
7	Gunung Api	23	32,42	47	8,2	276	3,2	200.634	2,1
8	Gas Beracun	3	8,57	13	2,3	44	0,5	33.744	1,3
9	Kebakaran Hutan/ Lahan	22	62,85	122	21,3	749	8,7	169.498	1,7
Kolom 2									

Sumber: BPBD Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, bahwa terdapat beberapa bencana alam yang memiliki presentase tinggi seperti banjir sebanyak 85,71%, longsor 82,25%, dan kekeringan 74,28%. Dalam penulisan ini, penulis juga menyajikan data kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beserta data terkait korban yang meninggal dunia akibat bencana alam. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 Kejadian dan Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018

Jenis Bencana	2016		2017		2018	
	Jumlah Kejadian	Korban MD	Jumlah Kejadian	Korban MD	Jumlah Kejadian	Korban MD
Banjir	298	20	270	15	172	4
Tanah Longsor	927	180	1.091	24	562	23
Kebakaran	468	42	600	12	590	6
Angin	419	65	490	9	415	4
Lainnya	-	-	12	-	-	-
Total	2.129	129	2.463	60	1.760	39

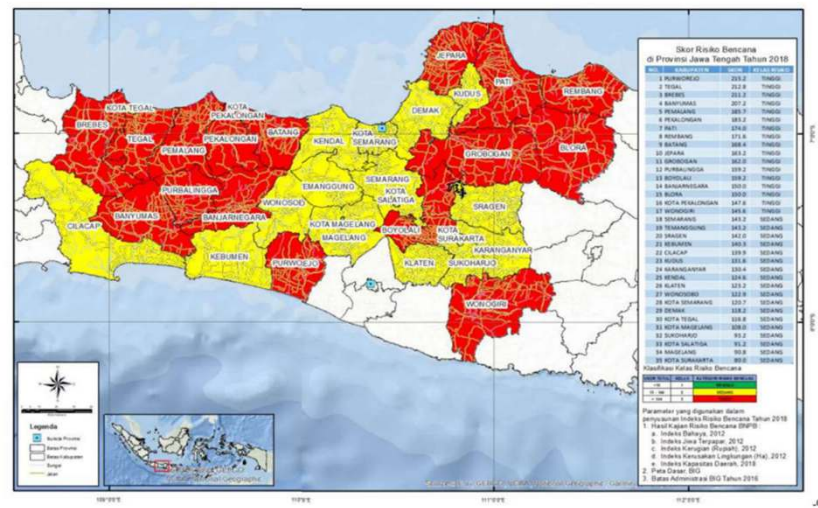
Sumber: BPBD Jawa Tengah, 2018

**Keterangan: MD: Meninggal Dunia.*

Berdasarkan penyajian di atas, terlihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan jumlah kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 kejadian bencana naik dari tahun 2016 sebanyak 2.112 kejadian bencana menjadi 2.463 kejadian bencana. Kemudian turun pada tahun 2018 dari 2.463 menjadi 1.751 kejadian bencana. Bencana tersebut terdiri dari banjir, tanah longsor, kebakaran, angin, serta bencana lainnya. Tabel di atas tersebut juga menyajikan data bahwa adanya penurunan korban akibat bencana alam dari tahun 2016-2018, dimana tahun 2016 terdapat 129 korban jiwa, kemudian menurun menjadi 60 korban jiwa pada tahun 2017, kemudian menurun kembali menjadi 39 korban jiwa. Penurunan korban jiwa tersebut dikarenakan ada upaya penanggulangan bencana yang dilakukan antara BPBD Jawa Tengah dengan pihak atau lembaga terkait dengan tujuan menekan dampak negatif akibat dari bencana alam (BPBD Jawa Tengah, 2018: 12).

Melandasi dari tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu laboratorium bencana alam yang terdapat di wilayah Indonesia, serta membutuhkan penanganan dan PRB untuk masing-masing bencana tersebut. Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indeks Risiko dan Kerentanan Bencana yang diterbitkan oleh BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana tinggi, baik Indeks Kerentanan maupun Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana merupakan penyajian data mengenai penilaian tingkat risiko bencana dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Indeks Risiko Bencana terdiri dari aspek bahaya/ ancaman, kerentanan, dan kapasitas/ ketahanan. Namun penulisan ini hanya memfokuskan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Indeks kerentanan menempati urutan ke-1, sedangkan indeks risiko berada pada peringkat 13. Data Indeks Kerentanan Bencana Jawa Tengah yang diterbitkan BNPB tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 3 Kabupaten/Kota memiliki persentase yang tinggi. Situasi yang menguntungkan dan 1 Kota dengan risiko sedang. Dalam pemutakhiran data indeks risiko bencana yang dilakukan oleh BNPB pada tahun 2013, ditemukan 26 Provinsi termasuk dalam kategori berisiko tinggi dan Jawa Tengah berada di peringkat ke-13 (berisiko tinggi) (BPBD Jawa Tengah, 2018: 13). Dari penjelasan di atas dapat dilihat melalui gambar 2.3 berikut.

Gambar 2. 3 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2018



Sumber: BNPB, 2018

Berdasarkan kondisi di atas, peringkat Jawa Tengah dalam kategori risiko dan kerentanan bencana mengalami penurunan yaitu peringkat risiko bencana nasional 13, sedangkan peringkat kerentanan menduduki peringkat pertama. Artinya upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2011 sampai tahun 2013 sangat mempengaruhi penentuan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penulisan ini, penulis menyajikan tabel terkait Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Penyajian data tersebut terkait perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2016-2018 yang dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 5 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	Kelas Risiko
1.	Purworejo	215.20	215.20	215.20	Tinggi
2.	Tegal	212.80	212.80	212.80	Tinggi
3.	Brebes	211.20	211.20	211.20	Tinggi
4.	Banyumas	207.20	207.20	207.20	Tinggi
5.	Pemalang	206.00	206.00	185.70	Tinggi
6.	Pekalongan	183.20	183.20	183.20	Tinggi
7.	Pati	174.00	174.00	174.00	Tinggi
8.	Rembang	171.60	171.60	171.60	Tinggi
9.	Batang	168.40	168.40	168.40	Tinggi
10.	Jepara	163.20	163.20	163.20	Tinggi
11.	Grobogan	162.00	162.00	162.00	Tinggi
12.	Purbalingga	159.20	159.20	159.20	Tinggi
13.	Boyolali	159.20	159.20	159.20	Tinggi
14.	Banjarnegara	150.00	150.00	150.00	Tinggi
15.	Blora	150.00	150.00	150.00	Tinggi
16.	Kota Pekalongan	147.60	147.60	147.60	Tinggi
17.	Wonogiri	145.60	145.60	145.60	Tinggi
18.	Semarang	143.20	143.20	143.20	Sedang
19.	Temanggung	143.20	143.20	143.20	Sedang
20.	Sragen	142.00	142.00	142.00	Sedang
21.	Kebumen	165.76	151.08	140.31	Sedang

Kolom 1

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	Kelas Risiko
22.	Cilacap	175.53	159.77	139.90	Sedang
23.	Karanganyar	130.40	130.40	130.40	Sedang
24.	Kendal	156.80	142.49	124.57	Sedang
25.	Klaten	123.20	123.20	123.20	Sedang
26.	Wonosobo	135.20	135.20	135.20	Sedang
27.	Kota Semarang	124.72	124.72	120.75	Sedang
28.	Demak	138.20	127.42	118.21	Sedang
29.	Kota Tegal	116.80	116.80	116.80	Sedang
30.	Kota Magelang	108.00	108.00	108.00	Sedang
31.	Sukoharjo	93.20	93.20	93.20	Sedang
32.	Kota Salatiga	91.20	91.20	91.20	Sedang
33.	Magelang	96.86	90.82	90.82	Sedang
34.	Kota Surakarta	80.00	80.00	80.00	Sedang
Kolom 2					

Sumber: BPBD Jawa Tengah, 2018.

Dari data di atas, dapat dilihat terdapat 10 Kabupaten yang memiliki indeks risiko bencana dengan kelas yang tinggi. Diantaranya yakni Kabupaten Purworejo, Tegal, Brebes, Banyumas, Pemalang, Pekalongan, Pati, Rembang, Batang, dan Jepara. Namun juga terdapat beberapa Kota dan Kabupaten yang juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat dari penyajian tabel tersebut.

2.2 Aktor Kerjasama Internasional dalam Pengurangan Risiko Bencana Inklusif

Dalam melakukan hubungan kerjasama internasional, diperlukannya dua aktor atau lebih untuk mewujudkan kepentingan bersama. Aktor tersebut adalah ASB dan BPBD Jawa Tengah yang akan dijelaskan melalui sub-bab berikut.

2.2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya menjadi kewajiban bersama para pemangku kepentingan di suatu negara yang kemudian diturunkan menjadi prioritas antara pemerintah seperti pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian disingkat menjadi BPBD merupakan badan penanggulangan bencana yang mengurus pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kota. Badan tersebut memiliki tiga tugas utama dalam penanggulangan bencana yakni pelaksana, komando, dan koordinasi.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 didasari pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, BPBD Jawa Tengah telah menyelenggarakan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana baik itu pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca terjadi bencana. Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Jawa Tengah bersumber dari dana APBN maupun APBD. Dalam melaksanakan kewajibannya, BPBD Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertuang dan dijabarkan

pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008. Tugas pokok BPBD Jawa Tengah (pada Pasal 2) yaitu melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi BPBD Jawa Tengah diatur pada Pasal 3 dengan garis besar untuk merancang, mendukung, serta mengimplementasikan penanggulangan bencana di berbagai daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BPBD Jawa Tengah juga memiliki beberapa sasaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Secara garis besar, sasaran tersebut berisikan upaya meningkatkan upaya yang dilakukan dalam PRB seperti mitigasi, poencegahan, kesiapsiagaan, serta pemulihan pasca bencana. Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok, BPBD Jawa Tengah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional, serta lembaga lainnya untuk melakukan pengurangan risiko bencana bagi semua masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam kerjasama tersebut, tentunya BPBD Jawa Tengah mengacu pada Kerangka kerja Sendai untuk menjalankan program kerjasama Pengurangan Risiko Bencana.

Gambar 2. 4 Logo BPBD Jawa Tengah



Sumber: BPBD Jawa Tengah

2.2.2 Arbeiter Samariter Bund

Arbeiter Samariter Bund (ASB) atau dikenal dengan Federasi Buruh Samaria merupakan Organisasi Non-Pemerintahan Internasional tertua yang berkedudukan di Cologne, Jerman. Organisasi ini memiliki 16 cabang di tingkat negara bagian dan lebih dari 200 cabang di tingkat regional, distrik dan kota di seluruh dunia. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1888 dengan latar belakang dimana terdapat banyak kecelakaan yang beresiko serius akibat mesin di tempat kerja pada revolusi industri abad ke-19. Organisasi ini awalnya dibentuk oleh enam orang pekerja tukang kayu Jerman yang dulunya memiliki inisiatif untuk membentuk kursus terkait pelatihan pertolongan pertama jika terjadi bencana.

Organisasi ini pada awalnya bernama *Samariterkursus für Arbeiter und Arbeiterinnen* atau Kursus Samaria untuk pekerja pada tahun 1895. Kemudian ASB merambah ke kota-kota di Jerman seperti Berlin, Dresden, Meiben, Cologne, Hamburg, dan Elberfeld untuk melakukan layanan medis, melatih orang awam

dalam pertolongan pertama akibat kecelakaan, serta kegiatan medis lainnya tanpa pamrih dan dilakukan secara manusiawi (Labisch, 1978:301). Kemudian organisasi ini resmi didirikan pada tahun 1909 dengan nama *Arbeiter Samariter Bund*. Sejak saat itu, ASB telah memberikan layanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, termasuk perawatan untuk orang tua, layanan penyelamatan dan Pertolongan Pertama, bantuan untuk anak-anak dan remaja, dukungan untuk penyandang cacat dan mereka yang menderita masalah mental, serta bantuan luar negeri dan pendidikan orang dewasa dengan moto “Kami membantu disini dan sekarang” serta membantu semua orang terlepas dari afiliasi politik, etnis, nasional, dan agama (ASB, 2021).

Kemudian seiring berkembangnya waktu, ASB mulai mengembangkan beberapa kegiatannya menjadi bantuan kemanusiaan, pengurangan risiko bencana, pengembalian dan reintegrasi, kerjasama internasional samaritan, memperkuat mitra lokal, mempromosikan kemitraan internasional. ASB juga merambah ke beberapa negara bagian lainnya seperti salah satunya yakni Asia. Kegiatan bantuan kemanusiaan ASB di Asia terjadi pada tahun 2004 setelah gempa laut berpotensi tinggi di wilayah Sri Lanka. ASB mendistribusikan obat-obatan dan perlengkapan bantuan lainnya (ASB, 2020).

ASB telah terlibat di Indonesia sejak tahun 2006 dengan fokus pada pengurangan risiko bencana. ASB turut membantu terkait bencana letusan gunung merapi yang berada di wilayah Klaten, Yogyakarta. Dari bantuan tersebut, ASB mendirikan kantor cabang yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta dengan nama *Arbeiter Samariter Bund Indonesia and the Philippines*. Kantor *Arbeiter-*

Samariter-Bund (ASB) untuk Indonesia dan Filipina telah bekerja di Indonesia di bawah Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia dan bekerja sama erat dengan Direktorat Pembangunan Pemerintahan Desa (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri.

ASB turut mendukung segala usaha pemerintah baik daerah maupun pusat dalam membangun ketahanan, peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat melalui program PRB serta bantuan kemanusiaan yang inklusif. Sebagai salah satu pendiri *Disability-inclusive Disaster Risk Reduction Network* (DiDRRN), ASB berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan inklusif disabilitas serta mengimplementasikan nilai aksi prioritas yang terdapat di SFA sebagai acuan dalam melaksanakan dan mendukung program-program dari pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini, ASB mengembangkan media komunikasi-informasi dan edukasi yang mengandung pesan kunci pengurangan risiko bencana inklusi disabilitas untuk multi ancaman bencana bagi para kelompok disabilitas dengan berbagai hambatan. Dalam media yang akan dikembangkan, tersedia beberapa informasi multi-ancaman tentang penyebab, dampak, langkah penyelamatan dan langkah pencegahan/mitigasi. ASB juga melakukan berbagai kerjasama dengan pemangku kepentingan Pemerintahan Daerah Provinsi di Negara Indonesia, salah satunya yakni Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 5 Logo Arbeiter Samariter Bund



Sumber: ASB Indonesia and The Philippines